

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam mengembangkan diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan baik pada sektor ekonomi, sosial, budaya, yang dilakukan secara terencana dan berdampak positif terhadap kemajuan desa dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.

Dalam menjamin pembangunan tersebut maka diterbitkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa dan PP Nomor 43 tahun 2014 sebagai pedoman teknis Pelaksanaan UU Desa. Keberadaan UU Desa ini menjadi penting dalam implementasinya, hal ini dikarenakan di dalam UU tersebut telah memuat pertama jaminan atau pengakuan rekognisi dan kewenangan atas desa, kedua terciptanya demokrasi desa, dimana musyawarah menjadi majelis tertinggi dalam menentukan keputusan, ketiga adanya pengawasan dan penguatan yang dijalankan oleh BPD, keempat adanya pengalokasian dana dari pusat yang disertai perencanaan dan penganggaran, kelima pendorongan kemandirian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pembangunan desa pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki (Widjajanti, 2011).

Keberhasilan pembangunan desa dapat diwujudkan dengan partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pemberdayaan. Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Suhayati, 2018). Tujuan dari pemberdayaan masyarakat pada akhirnya adalah untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup dan mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya.

Upaya untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa sudah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program, yang salah satunya adalah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Pendirian BUMDes telah diatur secara mendasar dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 1 ayat (6) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Secara teknis, dalam pendirian BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada pasal 87 hingga pasal 89. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset

jasa, pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan utama dari pendirian BUMDes adalah mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pada Pasal 1 ayat (6) menyatakan “Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pendirian BUMDes menjadi perhatian khusus oleh Presiden Joko Widodo dalam NAWACITA, khususnya Nawa Cita ke-tiga “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”, Pemerintahan Jokowi-JK berkomitmen mengawal implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan, untuk mencapai Desa yang maju, kuat, mandiri dan demokratis.

Dalam konteks demikian, pendirian BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mewujudkan Nawa Cita Pertama, Ketiga, Kelima dan Ketujuh, dengan pemaknaan sebagai berikut:

1. BUMDes menjadi salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Desa.
2. BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi Desa yang bersifat kolektif.

3. BUMDes menjadi salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia terkhusus di Desa.
4. BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi Desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi mikro Desa.

Adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta terbentuknya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa telah memberikan legalitas dan upaya peningkatan potensi melalui BUMDes. Adanya peraturan ini disambut baik oleh masyarakat khususnya desa yang mana disertai adanya peningkatan jumlah BUMDes setiap tahunnya.

Dalam upaya memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat, Pemerintah Desa (Pemdes) Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Mapan” berdasarkan inisiasi dari masyarakat desa yang didampingi oleh Kepala Desa Bangsri sebagai upaya untuk mendayagunakan potensi sumberdaya yang ada untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Badan Usaha ini dibentuk dengan maksud untuk menumbuhkembangkan perekonomian desa, meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan jasa bagi peruntukan hajat hidup masyarakat desa, dan sebagai perintis bagi kegiatan usaha ekonomi di desa. Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) diposisikan sebagai badan hukum usaha pada tingkat desa yang menjalankan fungsi penggerak ekonomi di desa. Selain itu BUMdes juga memiliki fungsi untuk menstimulus,

memfasilitasi, dan melindungi serta memberdayakan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Desa Bangsri yang mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani dan sebagian merantau ke kota-kota, sebagian besar warganya hanya mengandalkan hasil dari pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Setelah berjalannya program pemberdayaan melalui BUMDes yang diinisiasi oleh kepala desa ini, Desa Bangsri mulai mengalami banyak perubahan dari yang awalnya hanya desa terpencil dan jauh dari perkotaan dan tidak dikenal oleh masyarakat luas, kini berubah menjadi desa yang berkembang secara ekonomi dan sosial. setiap hari para pengunjung datang ke Desa Bangsri untuk berwisata dan menikmati perkembangan Desa Bangsri. Dengan hadirnya BUMDes, masyarakat desa yang awalnya hanya mengandalkan dari sektor pertanian dan hasil dari merantau, kini ikut bekerja dan mengelola unit usaha BUMDes dan sebagian lagi memanfaatkannya dengan berjualan di sekitar unit usaha BUMDes.

BUMDes “Maju Mapan” saat ini memiliki beberapa unit usaha yang bergerak pada sektor pariwisata dan ekonomi seperti unit usaha sablon dan percetakan, unit usaha kerajinan gypsum, dan wisata kampung Noyo Gimbal View. Pada unit usaha yang dibuat dan dibina oleh BUMDes “Maju Mapan” memanfaatkan dengan mengelola dari apa yang ada di Desa Bangsri tersebut, seperti pada unit usaha Noyo Gimbal View yang memanfaatkan tanah bengkok milik desa yang diubah menjadi tempat wisata.

Berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Desa Bangsri, jumlah rumah miskin tiap tahun mengalami penurunan. Dimana jumlah kepala keluarga KK pada tahun 2021 sebanyak 408 KK dan 924 individu termasuk dalam

status miskin. Pada tahun berikutnya jumlah rumah tangga miskin (RTM) menurun menjadi 361 KK dan 825 individu, dan pada tahun 2023 jumlah rumah tangga miskin kembali menurun menjadi 209 KK dan 783 individu. Kondisi tersebut sebanding dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Blora.

Tabel 1. 1 Jumlah Rumah Tangga Miskin Desa Bangsri

Tahun	Jumlah Rumah Tangga Miskin	Jumlah Penduduk Miskin
2021	408	924
2022	361	825
2023	209	783

Sumber: Dokumen Desa Bangsri (2024)

Selain itu, Indeks Desa Membangun Desa Bangsri juga meningkat seiring dengan berkembangnya Desa Bangsri kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2021, Desa Bangsri memiliki skor IDM sebesar 0,6498, pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,6689, selanjutnya pada tahun 2023 meningkat menjadi 0,6873, kemudian pada Mei 2024 Desa Bangsri ditetapkan menjadi desa maju dengan skor 0,7095.

Tabel 1. 2 Skor Indeks Desa Membangun (IDM)

Tahun	Skor Indeks Desa Membangun (IDM)
2021	0,6498
2022	0,6689
2023	0,7095

Sumber : Data Desa Bangsri (2024)

Berdasarkan menurunnya jumlah kemiskinan dan naiknya skor Indeks Membangun Desa tersebut, mencerminkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Mapan” Desa Bangsri mampu memberdayakan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat berangsur-angsur membaik.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagai gagasan awal dalam penelitian ini, maka dapat ditarik penelitian dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes “Maju Mapan” di Desa Jepon. Fokus permasalahan pada penelitian ini adalah analisa terhadap proses pemberdayaan pada masyarakat yang dilakukan oleh BUMDes “Maju Mapan” Desa Jepon, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Blora.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka muncul permasalahan yang dianggap menarik dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Mapan” di Desa Bangsri, Kec. Jepon Kab. Blora?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk:

1. Menjelaskan upaya Pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Mapan” di Desa Bangsri, Kec. Jepon, Kab. Blora,
2. Menjelaskan hasil dari pemberdayaan masyarakat yang dilakukan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Maju Mapan” di Desa Bangsri, Kec. Jepon, Kab. Blora.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti, penelitian ini digunakan sebagai referensi ilmiah untuk memperoleh manfaat dan pengembangan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan serta dapat mengetahui bagaimana pemberdayaan yang dilakukan BUMDes “Maju Mapan” di Desa Bangsri, Kec. Jepon Kab. Blora

1.4.2 Manfaat Praktis

Kegunaan praksis atau kegunaan yang dapat dijalankan secara riil:

1. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan terutama dalam menangani kasus kemiskinan dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar desa melalui pendirian BUMDes yang variatif dan inovatif.
2. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat bahwa keberlangsungan BUMDes juga dipengaruhi dengan adanya partisipasi masyarakat aktif di dalamnya.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dengan melihat dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti yang lainnya yang mana memiliki tujuan yakni mengisi ruang kosong peneliti sebelumnya sehingga dapat dilakukannya penyempurnaan kembali. Berikut ini merupakan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti yang kemudian menjadi landasan dan menjadi salah satu konsens dalam mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Anggit Henggar Jati yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) DE BALE di Desa Cingkrong Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan”, (2022), Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. Skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana peran pemerintah dalam pendirian BUMDes De Bale, kemudian peran tersebut dibagi menjadi dua pihak yaitu peran Pemdes Cingkrong dengan Pemerintah Daerah Grobogan. Penelitian ini menggunakan teori otonomi desa dan teori otonomi daerah, dimana peran Pemdes dan Daerah menjadi hal yang penting dalam keberlangsungan pendirian BUMDes. Hasil penelitiannya pada proses pembangunan, Pemdes menjadi promotor utama dalam penggerak pembentukan BUMDes De Bale, dimana Pemdes telah melakukan tahapan seperti menemukan inisiatif dari Pemdes, menginventarisir adanya potensi desa mencari sumber daya manusia yang akan mengelola, dan memastikan adanya pihak dalam penyertaan modal. Lalu, peran pemerintah daerah melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Grobogan melakukan pendampingan dan pembinaan, mensosialisasikan ide gagasan, dan menetapkan peraturan desa.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fitria dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”, (2020), Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Al-Furqon Prabumulih. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pemberdayaan melalui BUMdes Maju Makmur dengan membuat berbagai usaha binnaan yang dijalankan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan yang mana pada pemberdayaan ekonomi meliputi bantuan sosial, bantuan

pembangunan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan mitra usaha. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BUMdes Maju Makmur adalah pemberian modal, pemasaran, kemitraan usaha dan kekuatan kelembagaan. Lalu implikasi dari pemberdayaan ekonomi melalui BUMdes adalah kemudahan menambah modal usaha, menambah produksi masyarakat, kemudahan mendapat sarana pertanian, peningkatan pendapatan, kehidupan sosial ekonomi, dan menambah wawasan para pegawai BUMdes.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Kholilatil Arifah dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat”, (2019), jurusan pengembangan masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat dan teori stimulus respons (S-R), dimana pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri. Hasil penelitian ini untuk melakukan pemberdayaan, BUMDes melakukan penyadaran, pelatihan, pendampingan dan evaluasi kepada masyarakat desa.

Dari beberapa penelitian diatas, dapat dilihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh BUMDes memiliki berbagai manfaat bagi masyarakat dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sehingga dapat memandirikan

masyarakat. Dari beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan pada fokus penelitian yaitu sama-sama meneliti tentang pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, hanya saja pada penelitian ini berfokus pada upaya yang dilakukan oleh BUMDes dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam studi kasus BUMDes “Maju Mapan” Desa Bangsri Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Pemberdayaan

Secara konseptual, pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan disini merujuk pada kemampuan seseorang dalam mengubah sebuah keadaan dari ketidakmampuan menjadi berdaya dan memiliki kekuatan untuk menentukan keputusan serta tindakan yang akan dilakukan.

Menurut Sumodiningrat, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan melalui potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun dalam proses pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut 2 pihak, yakni masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya yang ada melalui penetapan kebijakan program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, pemerintah lebih menekankan pada pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, untuk menciptakan peluang sebagai usaha untuk mencapai keinginan masyarakat sendiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji permasalahan pembangunan mereka dan membuat suatu kegiatan-kegiatan untuk mengatasi masalah tersebut. Berawal dari permasalahan masyarakat, pemberdayaan menjadi dasar yang memungkinkan masyarakat untuk bertahan dan dalam artian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.

Sumodiningrat (1999), berpendapat bahwa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, setidaknya dapat dilakukan dari tiga sisi, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan masyarakat untuk berkembang (*Enabling*). Menciptakan iklim untuk masyarakat dapat berkembang menjadi dasar untuk pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi diri yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki daya. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. Memperkuat potensi dan daya yang dimiliki masyarakat (*Empowering*). Dalam memperkuat potensi dan daya masyarakat diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

- c. Memberikan perlindungan (*Protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus di cegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari upaya pembangunan sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah masyarakat adalah masyarakat merupakan subjek dari pembangunan, dan tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan itu sendiri.

1.6.1.1 Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan pada dasarnya ditujukan untuk mengubah perilaku dan kebiasaan masyarakat agar mampu untuk berdaya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat tidak hanya sekedar menekankan pada hasil, namun juga pada proses yang dilalui, salah satunya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat. Untuk meraih keberhasilan tersebut, pemberdayaan perlu

dilakukan melalui pendekatan. Menurut Suharto (2010), penerapan pendekatan dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan melalui 5P yaitu:

- a. Pemungkinan adalah penciptaan kondisi atau suasana yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengembangkan potensinya dengan maksimal.
- b. Penguatan yaitu peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat terutama yang berkaitan dengan potensi sosial sehingga mampu untuk memecahkan masalah serta memenuhi kebutuhannya.
- c. Perlindungan adalah melindungi masyarakat agar tidak terjadi persaingan antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok yang lemah. Perlindungan menjaga agar tahapan penguatan yang telah dilakukan tidak mengalami kemunduran dan kegagalan.
- d. Penyokongan adalah pemberian bimbingan, penyuluhan serta dukungan kepada masyarakat untuk dapat menjalankan perannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat supaya tidak terjatuh dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah.
- e. Pemeliharaan yaitu menjaga kondisi agar tetap kondusif sehingga menciptakan keseimbangan distribusi kekuatan antar kelompok masyarakat.

Selanjutnya, dalam proses pemberdayaan dibutuhkan beberapa tahapan pemberdayaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Penyadaran

Proses penyadaran sering kali disamakan dengan kegiatan sosialisasi, karena keduanya bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta

pemahaman mengenai kegiatan pembangunan yang akan dilakukan. Untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perubahan dalam masyarakat, serta menumbuh kembangkan keyakinan masyarakat terhadap keberhasilan upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan melalui pembangunan berbasis masyarakat, sering kali diterapkan metode pelatihan untuk menumbuhkan kembangkan motivasi atau *Achievement Monitoring Training* (AMT), yaitu latihan motivasi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.

b. Pelatihan

Secara umum, pelatihan adalah bagian dari Pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan individu, masyarakat, lembaga dan organisasi. Menurut Moekijat pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori. Sasaran pelatihan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan kehidupan masyarakat dan mampu mendorong peningkatan ekonomi di pedesaan.

c. Pendampingan

Pendampingan dapat dipahami sebagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan tenaga pendamping sebagai fasilitator, komunikator, motivator dan dinamisator. Pada dasarnya, pendampingan merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih

baik. Selain itu diarahkan untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan partisipatif.

d. Evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini melibatkan masyarakat untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

Menurut Mardi Yatmo Hutomo (2000), kegiatan pemberdayaan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a. Bantuan modal

Permodalan menjadi aspek yang penting dalam keberlangsungan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Permodalan menjadi penting karena apabila tidak adanya modal, maka masyarakat tidak mampu berbuat untuk dirinya dan lingkungan sekitar.

b. Bantuan pembangunan prasarana

Tersedianya prasarana di lingkungan masyarakat menjadi penggerak untuk mendorong dan meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan adanya prasarana, masyarakat dapat dengan mudah untuk melakukan aktivitas.

c. Bantuan pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan yang dapat memicu berkembangnya potensi yang dimiliki masyarakat. Melalui pendampingan, masyarakat dapat memahami potensi yang mereka miliki. Pendampingan dilakukan dengan memfasilitasi proses belajar atau refleksi dan seorang pendamping dapat menjadi mediator serta mentor masyarakat dalam mengembangkan potensi.

d. Penguatan kelembagaan

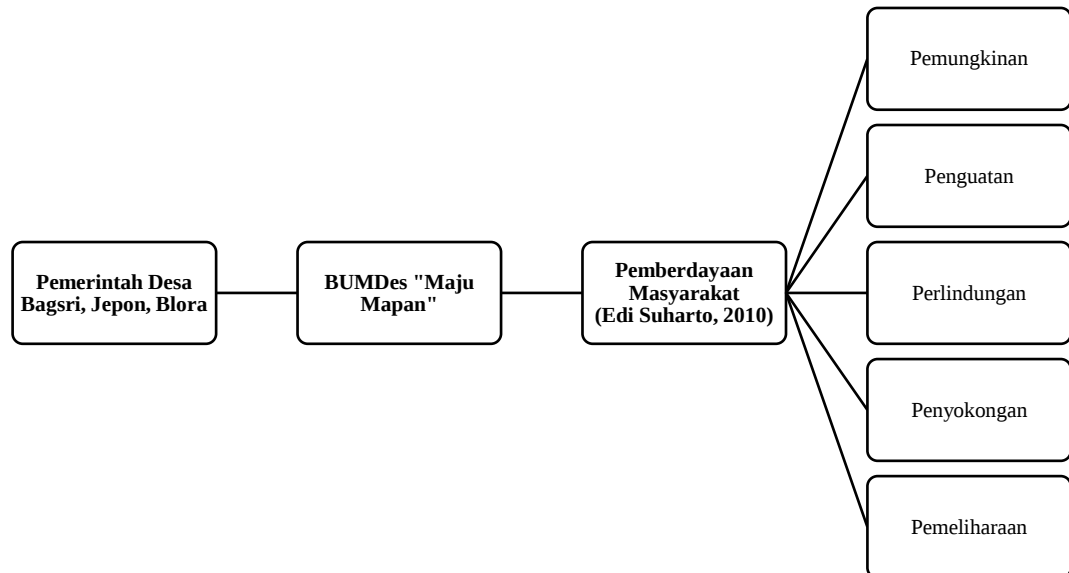
Adanya sebuah lembaga atau organisasi di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam keberjalanan pemberdayaan, karena dengan adanya sebuah lembaga, masyarakat memudahkan masyarakat untuk melakukan akses-akses yang diinginkan, seperti permodalan, musyawarah masyarakat dan lain sebagainya.

e. Penguatan kemitraan

Pada akhirnya, pemberdayaan masyarakat adalah untuk penguatan bersama, di mana pihak yang kuat akan berkembang jika ada pihak yang lemah, begitu juga dengan yang pihak lemah akan berkembang jika ada pihak yang kuat. Daya saing hanya ada jika terdapat keterkaitan antara pihak yang kuat dan pihak yang lemah. Oleh karena itu, melalui kemitraan masing-masing pihak akan diberdayakan dengan optimal.

1.7 Kerangka Berpikir

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



Sumber: Suharto (2010) dengan olah pribadi

Berdasarkan bagan kerangka berpikir tersebut maka dapat dijelaskan bahwa;

- a. Pemdes Bangsri merupakan salah satu Pemdes yang berada di Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora yang melakukan pemberdayaan masyarakat sebagai peran dan fungsi pemerintahan. Proses pemberdayaan tersebut telah berlangsung dalam sektor ekonomi, sosial, dan kesejahteraan dengan wadah BUMDes "Maju Mapan".
- b. Berkaitan dengan proses pemberdayaan masyarakat tersebut dalam penelitian ini akan dijabarkan menggunakan pendekatan proses pemberdayaan masyarakat 5P (Suharto, 2010). Pencarian data, pembahasan, penyajian, dan analisis data akan dijabarkan menggunakan

indikator pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan, dan pemeliharaan.

1.8 Operasionalisasi Konsep

Penjelasan dari berbagai teori mengenai pemberdayaan masyarakat, serta peran dari Pemdes tersebut menjadi landasan teori dalam melakukan penelitian mengenai upaya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora. Teori pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh Sumodiningrat menjadi acuan dalam memahami upaya pemberdayaan masyarakat, serta penjelasan mengenai proses pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Edi Suharto, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan. Kemudian diperkuat dengan teori peran Pemdes yang dikemukakan oleh Musa, di mana Pemdes memiliki peran sebagai fasilitator, dinamisator, dan regulator. Peran Pemdes dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut aktif berpartisipasi dalam tiap tahapan pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dapat diwujudkan melalui adanya BUMDes di desanya. Teori dari Sumodiningrat, Edi Suharto, dan Musa dijadikan landasan berkaitan dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes.

Tabel 1. 3 Operasionalisasi Konsep

Indikator	Sub Indikator	Ketercapaian
Pemungkinan: Sejauh mana lingkungan telah diciptakan untuk memungkinkan masyarakat dapat berpartisipasi dan	a. Keterlibatan masyarakat dalam proses identifikasi b. Identifikasi Kekuatan Potensi Desa	a. Proses identifikasi Pemdes awal untuk tahap pengembangan, b. Identifikasi Pemdes dalam kekuatan SDM, c. Identifikasi Pemdes pada potensi desa

Indikator	Sub Indikator	Ketercapaian
mengembangkan potensi dalam kegiatan BUMDes		d. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyadaran. e. Kesadaran berbagai aktor dalam pemungkinan
Penguatan: Peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan kehidupan mereka dan partisipasi dalam keberlangsungan BUMDes	a. Penyediaan wadah potensi b. Peningkatan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui BUMDes	a. Proses pembuatan rencana BUMDes “Maju Mapan”, b. Penetapan target dari BUMDes dan potensi masyarakat, c. Penyediaan fasilitas BUMDes, dan d. Pemahaman terhadap peluang.
Perlindungan: Perlindungan masyarakat dari berbagai resiko dan kerentanan yang dapat menghambat.	a. Terdapat jaminan bagi kelompok-kelompok pemberdayaan secara menyeluruh	a. Terdapat Identifikasi dan pengolahan kelompok-kelompok BUMDes, dan b. Terdapat Jaminan perlindungan Pemdes
Penyokongan: Dukungan yang diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan peluang yang tersedia.	a. Terdapat dukungan dan dorongan Aktor penyedia kepada masyarakat untuk berkembang	a. Terdapat dorongan dari Aktor yang terlibat (Perangkat Desa dan Pengurus BUMDes) kepada masyarakat, b. Terdapat strategi peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes, dan c. Pendekatan kepemimpinan desa terhadap komitmen pemberdayaan masyarakat.
Pemeliharaan: Ketersediaan pemeliharaan untuk menjamin proses keberlangsungan pemberdayaan	a. Terdapat proses pemberdayaan yang berjalan konsisten b. Terdapat kesadaran Dampak	a. Terdapat keberlangsungan proses pemberdayaan melalui BUMDes yang konsisten,

Indikator	Sub Indikator	Ketercapaian
untuk menjaga stabilitas.		b. Terdapat evaluasi keberlangsungan pemberdayaan, dan c. Terdapat kesadaran mengenai dampak yang diperoleh dan usaha untuk mempertahankan dan merawat.

Sumber: Data Olah Pribadi (2024)

1.9 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk memahami secara mendasar dalam bentuk yang terorganisasi yang penuh dengan ketelitian dan kritis guna menemukan fakta untuk menentukan sesuatu. Menurut Parson penelitian adalah sebuah kegiatan untuk menemukan fakta atas sesuatu secara bertahap dengan yakin bahwa sebuah pencarian tersebut akan mendapatkan hasil untuk memecahkan suatu masalah yang ada. Maka metode penelitian menjadi cara untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam proses mencari fakta untuk menentukan sesuatu.

1.9.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini dipilih dikarenakan untuk memperoleh gambaran tentang upaya pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes. Menurut Lexy, penelitian kualitatif merupakan salah satu kegiatan untuk melakukan pemahaman yang dialami oleh subjek peneliti seperti adanya sebuah perilaku, persepsi, tindakan atau pun motivasi yang mana secara keseluruhan bisa disajikan dalam bentuk penggambaran kata-kata dan bahasa yang ilmiah.

1.9.2 Tempat Penelitian

Lokasi atau tempat dilaksanakannya penelitian ini sesuai dengan lokasi sumber data yang didapatkan, karena penelitian ini akan membutuhkan data yang semestinya menjadi fokus penelitian dan penelitian akan dilakukan di Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

1.9.3 Informan Penelitian

Metode pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive* (*Purposive Sampling*), di mana informan pada penelitian ini telag dilakukan dengan wawancara kepada;

1. Laga Kusuma selaku Kepala Desa Bangsri atau representatif Peran Pemdes Bangsri sebagai penginisiasi terbentuknya BUMDes “Maju Mapan”,
2. Ali Khundori, yang merupakan ketua BUMDes “Maju Mapan”,
3. Parno yang merupakan ketua LPMDes Jepon, serta
4. Susanto yang merupakan masyarakat Desa Bangsri, Kec. Jepon, Kab. Blora dan berperan sebagai pengurus Naya Gimbal View.

1.9.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan Lofand (Moleong, 2017), sumber data dalam suatu penelitian tipe kualitatif yakni berupa kata-kata, dan kalimat dan sebuah tindakan nyata. Selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan yang lainnya. Maka dari itu penelitian skripsi ini menggunakan 2 data yakni data primer dan data sekunder sehingga dapat memenuhi syarat untuk sebuah penelitian kualitatif deskriptif.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang berbentuk sebuah kata-kata ataupun kalimat yang diucapkan secara lisan atau bahkan tingkah laku yang dilakukan oleh subjek yang dipercayai dalam penelitian ini yang mana merupakan seorang yang berkenan untuk diwawancarai. Data primer penulis diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa Bangsri, Ketua LPM Desa Bangsri, Ketua BUMDes Desa Bangsri, dan Masyarakat Desa Bangsri, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung ke lapangan dan data diambil dari data yang sudah diterbitkan oleh sumber lain. Data yang diperoleh melalui dokumen dalam bentuk sebuah catatan, tabel, foto, dan lain-lain.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam sebuah penelitian dilakukan agar sebuah data yang diperoleh dapat dipastikan kebenarannya dan validasinya. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknis seperti berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah rangkaian percakapan yang memiliki tujuan tertentu, sebuah serangkaian ini dilakukan oleh dua orang yakni pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara atau narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh pewawancara. Proses wawancara ini menggunakan alat bantu ponsel untuk merekam percakapan dan juga digunakan untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh narasumber. Dalam

penelitian ilmiah ini menggunakan jenis wawancara yang telah dikemukakan oleh Gaba dan Linclon (Moleong, 2017), yakni wawancara terstruktur, yang mana pewawancara telah menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber untuk digunakan dalam penunjang penelitian ini; Kepala Desa Bangsri, Ketua BUMDes, Masyarakat.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka yang digunakan untuk memperoleh data sebagai penunjang data primer yang diperoleh. Studi pustaka atau kepustakaan diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mendengar dan mencatat serta mengolah data menjadi bahan penelitian.

1.9.6 Analisis Data dan Interpretasi Data

Analisis data menurut Bogdan dan Bigklen adalah sebuah kegiatan yang dilakukan dengan dasar adanya sebuah data dengan cara mengorganisasikan data dan menyaring untuk dapat menjadi satuan yang dapat dikelola dengan mencari pola yang penting dan kemudian ditulis untuk dapat dibaca dan dipahami oleh orang lain yang kemudian dilakukan penulisan atau biasa disebut interpretasi data.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga teknik yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah sebuah kegiatan merangkum, memilah poin-poin yang bersifat utama, memfokuskan pada poin yang penting, dan

melakukan pencarian tema dan pola dan membuang data yang di luar dari konteks yang tidak sesuai dengan kepentingan dalam proses penelitian.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman dalam bahwa Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan atau tahapan akhir dalam proses analisis data, pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh, lalu mencari makna data yang dikumpulkan.